

**KENDALA-KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN
PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) TERKAIT
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDY DI POLRES MALANG KOTA)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DEWANTA BUDI KHARISMA
0810113036**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2013

Kendala-kendala penyidik dalam melaksanakan pembelian terselubung (*undercover buy*) terkait pengungkapan tindak pidana narkotika (studi di Polres Malang kota), DEWANTA BUDI KHARISMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, email: dewantabudii@yahoo.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang kendala-kendala penyidik dalam melaksanakan pembelian terselubung (*undercover buy*) terkait pengungkapan tindak pidana narkotika.

Polres kota Malang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu dengan teknik pembelian terselubung. Untuk menjalankannya Polres kota Malang dalam melakukan teknik pembelian terselubung mengalami kendala.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Polres kota Malang dalam melaksanakan pembelian terselubung, serta mengetahui berbagai kendala dan upaya apa yang dilakukan.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis.

Dalam melakukan teknik pembelian terselubung Polres kota Malang mengalami kendala, diantaranya : faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, kendala dalam mendapatkan informan, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan jaringan narkoba yang menggunakan teknik ranjau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: meningkatkan SDM dan melaporkan agar dapat segera dipenuhi, mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar, penyidik harus bersikap profesional dalam melakukan tugasnya, mengoptimalkan peran tersangka atau kurir yang telah tertangkap, mencari lokasi pembelian terselubung yang jauh dari masyarakat, dan dengan memanfaatkan pasal 86 ayat (2).

Kata kunci : penyidik, pembelian terselubung, tindak pidana narkotika

A. Latar Belakang

Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, para Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.¹

Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran. bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Sebagai contoh Awal tahun 2012 ini dijadikan moment oleh Pemerintah Malang untuk terus melancarkan perang terhadap narkoba. Betapa tidak, sampai penutupan kalender tahun lalu, tercatat ada 122 kasus narkotika dan psikotropika yang menyeret 158 tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan. Dengan rincian 48 kasus penggunaan sabu-sabu dan 50 kasus penggunaan ganja. Sedangkan untuk penggunaan obat-obatan serta pil koplo terpantau 20 kasus. Empat kasus tersisa merupakan kasus penggunaan sabu-sabu yang dibarengi dengan penggunaan ganja. Adapun barang bukti tindak pidana narkotika tersebut antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, heroin hingga pil koplo, selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika.²

¹ O.C Kaligis & Associates, **Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia**, Cetakan ke-2. Alumni Bandung, 2007, h.vii.

² Hasil wawancara prasurey dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 juni 2012.

Tindak pidana narkoba yang sering terjadi di kota Malang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkoba, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkoba. Peredaran gelap narkoba di kota Malang banyak yang menggunakan sistem terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain dan juga tidak mengenal siapa yang menjadi bandar narkoba.³

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, yang kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba. undang-undang tersebut dinilai sudah tidak memadai maka kemudian dikeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan Polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkoba seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara

³ Hasil wawancara prasurvei dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 juni 2012

Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika sekarang ini. Karena didalam undang-undang tentang narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika ini. Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian kota malang terkait dengan pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Malang dalam mengatasi kendala-kendala melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengkaji pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi, data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas penyidik Reserse Narkoba Polresta Malang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis.⁶ Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literature, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan per undang-undang an yang berlaku.

D. Pembahasan

Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana narkoba, polri harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undercover Buy (pembelian terselubung) Pengertian Undercover atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan

⁴ Ronny Hanijito Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990 hal. 34

⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, Hal. 24

⁶ Bambang Sunggono, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12.

segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi.⁷ Tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) diatur dalam pasal 75 huruf J undang-undang narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.

Pembelian Terselubung (*undercover buy*) sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Jaklap/04/VIII/ 1983 disebutkan bahwa Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.⁸

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkotika dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tentang proses yang harus dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*)

⁷ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁸ Petunjuk Lapangan, No. Pol. Jaklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika

dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini polri mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal.

Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat penyidik polri menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut :⁹

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan.¹⁰ Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.¹¹

2. Terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Kisaran mengenai

⁹ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹¹ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II satuan reserse narkoba malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain

3. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.¹²

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi , biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan

¹² Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.¹³

Kendala-kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut ;

1. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.¹⁴

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.¹⁵

Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak

¹³ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bripta Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.¹⁶

2. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.¹⁷

3. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir

¹⁶ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.¹⁸

Walaupun banyak kendala yang dihadapi polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

1. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan

Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal.¹⁹ Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik polri Direktorat Reserse narkoba.

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba kota malang agar dapat segera

¹⁸ Hasil wawancara dengan bripta Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.²⁰

2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.²¹ penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih 3 juta rupiah agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

3. Penyidik harus bersikap profesional

Penyidik yang akan melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangatlah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh

²⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

²¹ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

polri agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri.²²

Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini, salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional adalah salah satu anggota polisi reskoba malang ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsu tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsu surat perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (*undercover buy*), hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar.²³

Jika upaya-upaya untuk mengatasi kendala internal sudah dilakukan oleh polri, yang kedua adalah upaya represif, yaitu polri dalam mengatasi jika suatu tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah terjadi. Adapun upaya-upayanya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal sebagai berikut

1. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan biasanya

²² Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012

²³ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012

juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.²⁴

Cara melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan (*undercover buy*) polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, yang kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka

2. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung

Upaya yang dilakukan penyidik polisi dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:²⁵

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.

²⁴ Hasil wawancara dengan bripta Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

²⁵ Hasil wawancara dengan bripta Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

- b. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
 - c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkan dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Upaya yang dilakukan penyidik polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya undang – undang narkoba no.35 tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Alasan penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam tindak pidana narkoba adalah karena tindak pidana ini merupakan kejahatan tanpa korban. Dengan tidak adanya korban maka tidak akan ada orang sebagai korban yang akan melaporkan tentang tindak pidana narkoba. Proses untuk mendukung pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini adalah dengan melakukan Observasi (peninjauan), *surveillance*, *Undercover Agent* (penyusupan agen), Penyerahan narkoba dan psikotropika yang dikendalikan (*controlled delivery*), dan *Raid Planning Execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

1. Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan
 - b. Terbatasnya biaya operasional
 - c. Kendala penyidik setelah melakukan pembelian terelubung (*undercover buy*)

Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) adalah sebagai berikut :

- a. Kendala dalam mendapatkan informan / spionase
 - b. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung
 - c. Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau
2. Upaya-upaya polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Adapun upaya-upaya internal yang dilakukan oleh polri adalah sebagai berikut :
- a. Upaya dalam mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan
 - b. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas.
 - c. Upaya yang dilakukan penyidik setelah melakukan pembelian terselubung (*Undercover Buy*)

Sedangkan upaya-upayanya eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka.
- b. Upaya Menentukan Lokasi Pembelian Terselubung
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Berdasarkan pada kesimpulan diatas , maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Baiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja polri khususnya Direktorat Reserse Narkotika kota Malang yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung kasus narkotika yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkotika dalam berjalan dengan lebih baik.
- 2. Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengalami kegagalan.
- 3. Meningkatkan lagi penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika dan agar masyarakat juga ikut membantu member informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.

G. Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Bandung.

Ronny Hanijito Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta.

Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang- Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika.